

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd) DI KABUPATEN CIREBON**

Leliya

Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 45132, Indonesia

Corresponding author: Leliya, S.H, M.H; Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat; Email: leliya12@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, organisasi, komitmen dan program, serta pendekatan yang tepat, maka diluncurkan program khusus penanggulangan kemiskinan dengan mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian penduduk miskin yang produktif untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan. Dalam program khusus ini dibentuk kelompok-kelompok swadaya dengan semangat kooperatif yang dikembangkan di kalangan masyarakat desa. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program PNPM-MPd. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perencanaan PNPM-MPd di kabupaten Cirebon? Bagaimana pelaksanaan PNPM-MPd di kabupaten Cirebon? dan apakah manfaat, kendala pelaksanaan PNPM-MPd di kabupaten Cirebon? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi melalui pelaksanaan PNPM-MPd di kabupaten Cirebon, untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat desa di kabupaten Cirebon. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan lokasi penelitian dalam pembahasan ini adalah masyarakat desa di kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini adalah kondisi ekonomi masyarakat di beberapa desa di kabupaten Cirebon dalam keadaan perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui PNPM-MPd yang meliputi tahap perencanaan yaitu MAD-soaialisasi, Musdes-sosialisasi, Pelantikan KPMD, Penggalan gagasan, Musdes khusus perempuan, Musdes perencanaan, Penulisan usulan, verifikasi usulan, MAD Prioritas usulan, Mad penetapan usulan, Musdes informasi hasil MAD, SKPD (satuan kerja perangkat desa), pelaksanaan PNPM-MPd dilaksanakan oleh Tim pelaksana teknis desa dan oleh Unit pelaksana kegiatan pada tingkat kecamatan yang masing-masing unit pelaksana Kegiatan mendampingi Sembilan desa. Manfaat PNPM-MPd bagi masyarakat desa di kabupaten Cirebon sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat meningkat dari yang konervatif menjadi inovatif, meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin, terbukanya kesempatan kerja, sumberdaya manusia meningkat dari yang tidak mengerti manajemen keuangan menjadi mengerti dan diterapkan pada pekerjaan selanjutnya. Adapun yang menjadi kendala pelaksanaan PNPM-MPd adalah paradigma perempuan (istri) harus manut laki2(suami), usaha yang modalnya diperoleh dari pinjaman PNPM-MPd bangkrut, uang

pinjaman dari PNPM-MPd dipakai ketua kelompok, pengaruh politik desa (akibat pemilihan kuwu) wacana dana hibah.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat*

ABSTRACT

Awakening the citizen from the circle of the poverty needs the wisdom, organization, commitment, program, and the accurate approach. Therefore, the special program to abolish the poverty is needed. This program will encourage the passion of productive self-sufficiency and independence of the poor citizen to simultaneously release them from the poverty. In this special program, the groups of the self-help are established with the cooperative passion which is developed in the circle of the village citizen. That wisdom is put into the program of PNPM-MPd. The research questions are that how is the planning of the PNPM-MPd in the district of Cirebon? How is the implementation of the PNPM-MPd in the district of Cirebon? And what are the benefits, obstacles of the implementation of PNPM-MPd in the district of Cirebon? The aims of this research are to know the economic empowering through the implementation of PNPM-MPd in the district of Cirebon, to know the economic condition of the village citizen in the district of Cirebon. The approach used in this research is the judicial qualitative approach, the data collection is conducted through the observation, interview, documentation study, and the location of the research in this explanation is the village citizen of the Cirebon district. The result of this research is that the economic condition of the citizen in several villages in the district of Cirebon needs to be increased with the economic empowering through the program of PNPM-MPd which consists of the planning step, namely socialization of MAD (musyawarah antar desa), socialization of Musdes, KPMD inauguration, search of the suggestion priority, women special Musdes, Musdes of planning, suggestion writing, suggestion verification, MAD of the suggestion priority, Mad of suggestion decision, Musdes of result information of MAD, SKPD (satuan kerja perangkat desa), the implementation of the PNPM-MPd is conducted by the organizer technical team of the village and by the unit of event organizer in the level of sub-district that each of the organizer unit accompanies the nine villages. The benefit of the PNPM-MPd for the village citizen in the district of Cirebon is as the method of citizen economic empowering that increases from conervative to be inovative, increases the prosperity of the poor people, opens the job vacancy, increases the human resources from those who do not understand the financial management to be those who understand and apply it in the next job. The obstacles of the PNPM-MPd implementation are that the paradigm that the women (wife) must obey the husband, the fund got from the debt of bankrupt PNPM-MPd, the fund got from the debt of bankrupt PNPM-MPd is used by the chief of the group, the influence of the village politic (the election of the village head), the discourse of the donation fund.

Key words: *empowering, economic, citizen*

PENDAHULUAN

Program pembangunan nasional yang dinamakan PNPM-MPd, dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa. Melalui Program ini akan dipadukan program sektoral ataupun regional yang mencakup desa-desa tersebut sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin seperti buruh tani, petani berlahan sangat kecil, nelayan, buruh nelayan, perambah hutan, masyarakat terasing dan mereka yang putus sekolah adalah mereka yang diprioritaskan dalam PNPM-MPd. Hal ini mengingat penduduk miskin umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau menganggur atau hasil pekerjaannya tidak memberikan pendapatan yang memadai.

PNPM-MPd diarahkan pada upaya meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui perluasan kegiatan pembangunan dan ekonomi di desa. Upaya tersebut berupa pemberian perhatian dan bantuan khusus, seperti perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, modal usaha, pelatihan keterampilan, pembimbingan dan pendampingan serta pelaksanaan kegiatan yang dapat memacu peningkatan pendapatan. Dengan demikian, adanya berbagai program pembangunan baik sektoral, regional maupun PNPM-MPd, diharapkan dalam pembangunan Jangka Panjang kedua masalah kemiskinan dapat diselesaikan secara tuntas.

Studi Biro Pusat Statistik yang terbaru mengemukakan bahwa jumlah absolut penduduk miskin di Indonesia dengan ukuran garis kemiskinan yaitu pendapatan yang hanya mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum pangan 2.100 kalori perkapita perhari. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Cirebon pada khususnya, sehingga upaya khusus untuk membantu mereka menanggulangi kemiskinan tetap perlu dilakukan (BPS Angka, 2013).

Dalam rangka mengidentifikasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Cirebon perlu kiranya terhadap semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan tahapan proses perencanaan secara konsisten yakni berupa suatu rangkaian kegiatan mulai dari proses penentuan lokasi desa, kecamatan, kelompok sasaran, bahkan sampai pada penetapan kebijaksanaan program berdasarkan kebutuhan dasar penduduk miskin yang produktif agar mereka mampu lebih cepat meningkatkan taraf hidupnya.

Masalah pembangunan pantura khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitannya dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung, potensi

budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata (Dahuri, 2013).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa-desa, strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah berbasis kelompok dan berbingkai kelembagaan sosial atau pranata budaya yang sudah ada didalam masyarakat. Kebijakan dan program pemberdayaan selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya menangani residu yang ditimbulkan oleh proses-proses pembangunan. Seharusnya isu pemberdayaan masyarakat sudah menyatu (included) dalam kebijakan atau proses pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan weak sustainability cara-cara pembangunan yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan standar kehidupan secara inklusif (Dahuri, 2012).

Disamping berbagai kebijaksanaan sektoral dan regional, untuk menanggulangi kemiskinan, maka diluncurkan program khusus penanggulangan kemiskinan dengan mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian penduduk miskin yang produktif untuk bersama-sama melepaskan diri dari kemiskinan. Dalam program khusus ini dibentuk kelompok-kelompok swadaya dengan semangat kooperatif yang dikembangkan di kalangan masyarakat itu sendiri khususnya di desa-desa. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam program yang disebut PNPM-MPd sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. PNPM-MPd digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu. Berdasarkan berbagai deskripsi di atas, menunjukkan betapa pentingnya usaha-usaha untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Putra (2013), Universitas Sumatera Utara dengan judul Penelitian Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa program SPP masih belum efektif hal ini dapat terlihat bahwa program ini belum mencapai sasaran secara maksimal, masih adanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha, selain itu masih ditemukan banyak penyimpangan pemanfaat dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh adanya beberapa pemanfaat yang menggunakan dana SPP untuk keperluan sehari-hari. Dan juga masih terdapatnya kelompok yang tidak atau jarang mengikuti pertemuan rutin kelompok yang biasa mereka lakukan satu bulan sekali dikarenakan kesibukan masing-masing kelompok Meski demikian

upaya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut telah membawa perubahan yang berarti yaitu menjadikan masyarakat lebih mandiri, dan juga ada masyarakat yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

Kirana (2012), Universitas Sumatera Utara yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat telah efektif. Hal ini terlihat dari 4 indikator dalam melihat efektivitas suatu program, yaitu yang terdiri dari: tingkat kualitas, dimana yaitu pelayanan yang baik diberikan oleh pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau penerima manfaat, seperti bimbingan yang dilakukan oleh pihak BKM dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha. Tingkat kuantitas, dilihat modal yang diberikan dan jenis usaha yang digunakan. Modal tersebut harus merata pada setiap anggota KSM dan modal tersebut harus digunakan untuk mengembangkan atau membuka usaha. Dari dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh responden setelah menerima pinjaman Bergulir. Dari tingkat waktu pengembalian pinjaman bergulir terlihat bahwa tidak lebih dari 12 bulan. Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman bergulir yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu program yang efektif bagi warga miskin untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga yaitu dengan membuka atau mengembangkan usaha yang berbasis mikro.

Pratiwi (2011), Universitas Sumatera Utara Efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di desa Kampung baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Dilihat dari indikator efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa, PNPM tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Haris (2010), Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitiannya Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Pulo Dogom belum efektif. Hal itu terlihat dari 4 indikator dalam melihat efektivitas suatu kegiatan, yaitu terdiri dari: tingkat kualitas, dimana anggota kelompok kurang mudah untuk mendapatkan pendanaan dan pengembalian angsuran

pinjaman. Tingkat kuantitas, dilihat dari modal yang diterima masih kurang dalam pembagian yang tidak merata kepada anggota kelompok dan penghasilan hanya bertambah sedikit dikarenakan anggota yang membuka usaha dengan modal sendiri yang jumlahnya lebih besar dari pada modal yang diberikan oleh PNPM-MP. Tingkat dampak, dilihat dari jenis usaha yang dilakukan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan, jenis usaha tidak ada yang berubah menjadi usaha yang lebih besar, melainkan hanya terhadap penghasilan anggota kelompok yang berpengaruh. Tingkat waktu, dilihat dari pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan sebagian besar anggota membutuhkan waktu diatas 2 tahun untuk dapat menunjukkan hasil. Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan simpan pinjam perempuan dari PNPM-MP ini adalah program yang belum efektif bagi kelompok masyarakat, dan dalam pengentasan kemiskinan.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Cirebon, 2) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang lengkap dalam rangka menyusun penelitian individu.

METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti yang umum diterima, yaitu “studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah” (Sumardjono, 1989: 6). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel. Bentuk metode *non random sampling* yang akan dipakai adalah “*Purposive Sampling*”. Dalam *puposive sampling* ini “peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel” (Sumardjono, 1989: 20). Ukuran yang digunakan dalam penentuan sampel adalah klasifikasi jumlah skore variabel lemah suatu desa berdasarkan buku petunjuk penentuan desa dalam PNPM-MP yang dikategorikan perdesaaan. Desa-desanya tersebut adalah Desa Bungko Lor dan Desa Suranenggala, dengan jumlah skore variabel lemahnya tergolong tinggi, desa Pegagan Kidul dan Desa Keraton dengan jumlah skore variabel lemahnya tergolong sedang, dan Desa Surakarta dan Desa Pegagan Lor dengan jumlah skore variabel lemahnya tergolong rendah.

Responden yang diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan, yaitu:

- a. Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon,
- b. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon,
- c. Kantor Statistik Kabupaten Cirebon,
- d. Kepala Desa di Kabupaten Cirebon, yaitu:

- 1) Kepala Desa Pegagan Ior Kecamatan Kapetakan
 - 2) Kepala Desa Keraton Kecamatan Suranenggala
 - 3) Kepala Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
 - 4) Kepala Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala
- e. Kelompok Masyarakat, dan
- f. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK),

Bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, kemudian dikumpulkan dan diseleksi untuk diambil data khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk mendapatkan gambaran umum tentang Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Cirebon. Untuk menguji keabsahan data akan dilakukan cek ulang kepada informan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara informal dan hasil penelitian akan dipresentasikan terbuka kepada informan untuk memperoleh koreksi dan masukan. Data primer dari hasil wawancara yang dikumpulkan secara benar dan tepat. Setelah itu dihubungkan dengan data sekunder kemudian dianalisis. Sifat analisisnya adalah kualitatif, maksudnya disusun secara sistematis, logis, dan yuridis. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran umum tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya sekaligus memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen kepustakaan. Dalam penelitian ini wawancara memegang peranan yang sangat penting, karena metode wawancara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. Informan dalam pengumpulan informasi pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat desa, tim pelaksana kegiatan, unit pelaksana kegiatan dan pemerintah. Dalam melakukan analisis data peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan

menyajikan informasi. Terdapat enam langkah analisis data yang berhubungan dengan reduksi data dan interpretasi. Berkaitan dengan reduksi data, langkah-langkah analisis meliputi, pengorganisasian data, pembuatan kategori dan tema, dan *coding* data. Interpretasi data dilakukan melalui penjelasan alternatif, dan menulis laporan. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan metode triangulasi data, kemudian mengorganisir data, data reduction menentukan kategori, konsep, tema, pola dan terakhir melakukan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon yang sebagian wilayahnya terletak di sepanjang pantai laut Jawa menjadikan daerah ini dialami oleh berbagai karakteristik budaya, yaitu budaya asli daerah budaya luar maupun percampuran keduanya. Sebagian lagi wilayah Kabupaten Cirebon berada di daerah perbukitan sehingga makin beragam karakteristik yang ada dan ini merupakan suatu modal untuk kemampuan daerah. Disini pengaruh pembangunan dan modernisasi berdampak jelas terhadap perubahan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertanian dan keamanan, apalagi Kabupaten Cirebon merupakan pintu gerbang memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari berbagai gambaran tersebut di atas, dengan jumlah penduduk sebesar 2.293.397 jiwa dan luas wilayah administratif sebesar 990,36 km² maka Kabupaten Cirebon hanya dapat dioptimalkan oleh pemerintahan yang mantap untuk dapat menyatukan semua komponen yang ada. Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, sehingga secara keseluruhan dari total 424 desa yang ada, 12 diantaranya adalah kelurahan yang kesemuanya terdapat di wilayah Kecamatan Sumber.

PNPM Mandiri Perdesaan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan perencanaan PNPM-MPd di Kabupaten Cirebon diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, sehingga menghasilkan alur kegiatan PNPM-MPd sebagai berikut.

Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Cirebon dimulai dengan kegiatan sebagai berikut.

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) – Sosialisasi

Merupakan pertemuan antar Desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Musdes – Sosialisasi

Merupakan forum pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebar luasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

c. Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

KPMD yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat.

d. Penggalian Gagasan

Merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perencanaan partisipatif yang dimulai dengan pertemuan dusun.

e. Musdes Khusus Perempuan

Musyawarah desa khusus perempuan dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.

f. Musdes Perencanaan

Merupakan forum pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat kelompok-kelompok/dusun.

g. Penulisan Susulan

Merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD (Musyawarah Antar Desa). Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan.

h. Verifikasi Susulan

Merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

i. MAD (Musyawarah Antar Desa) Prioritas Susulan

Merupakan forum pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV (Tim Verifikasi) dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya.

j. MAD (Musyawarah Antar Desa) Penetapan Susulan

Merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan.

k. Musyawarah Desa (MUSDES) Informasi Hasil MAD

Merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

l. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

m. Musdes Pertanggungjawaban

Merupakan musyawarah Desa untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil kegiatan oleh TPK kepada Masyarakat dilakukan minimal dua kali.

n. Musdes Serah Terima (MDST)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat.

o. Pengendalian dan Pengawasan

Dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan guna menjamin semua proses kegiatan sesuai dengan prinsip, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan, pemeriksaan, pelaporan, pemantauan, penanganan, pengaduan dan masalah serta evaluasi merupakan suatu tindakan dari pengendalian.

p. Pengawasan dan Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan Rutin (F/FT Kec, F/FT Kab.),
- 2) Pemeriksaan Insidental (KMN, KMP, TK-PNPM),
- 3) Peninjauan Sejawat (F/FT Kec, Pengurus TPK),
- 4) Pemeriksaan Eksternal Struktural (BPKP)

q. Pemantauan

- 1) Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat,
- 2) Organisasi Masyarakat (Ormas),
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat,
- 4) *Province Base Monitoring*,
- 5) *Pers*

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cirebon

a. Unit pengelola Kecamatan (UPK) Suranenggala diketuai oleh Bapak Wahyudi mengkoordinir 9 desa yaitu: Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Keraton, Desa Surakarta, Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala lor, dan Desa Suranenggala. Dari kesembilan desa tersebut peneliti mengambil 3 desa sebagai sampel penelitian yaitu Desa Surakarta, Desa Keraton, dan Desa Suranenggala. Pengambilan sampel penelitian tersebut mendasarkan pada peringkat pelaksanaan PNPM-MPd tahun 2014, menurut fasilitator tingkat kecamatan Badri dan ketua UPK Kecamatan Suranenggala Wahyudi yang menjadi kriteria penentuan peringkat desa dalam pelaksanaan PNPM- MPd di UPK Kecamatan Suranenggala yaitu:

- 1) Tingkat pengembalian SPP,
- 2) Tingkat perencanaan dalam musyawarah desa,
- 3) Tingkat keberhasilan pelaksanaan tahun sebelumnya,
- 4) Cepat atau lambatnya pelaporan kegiatan,
- 5) Tingkat swadaya masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat yang muncul
- 6) Rencana dan realisasi dalam arti volume tercapai.

Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti mengambil sampel penelitian meliputi Desa Surakarta peringkat tinggi, Desa Keraton peringkat sedang, Desa Suranenggala peringkat rendah.

1) Desa Surakarta

Alur pelaksanaan PNPM-MPd di Desa Surakarta dimulai dari RT/RW, Dusun, Desa, pada tingkat desa terdapat 6 utusan perwakilan dan terdapat 2 usulan dari perempuan berupa modal simpan pinjam perempuan (SPP) dan infrastruktur (fisik) berupa sektor pendidikan (sekolah) serta campuran program yang diusulkan berupa fisik (infrastruktur). Kemudian diakhiri pada tingkat kecamatan akan diadakan musyawarah antar desa. Desa Surakarta terdapat 2 program PNPM-MPd yang disetujui dalam musyawarah antar desa pada tahun anggaran 2014 yaitu program SPP (Simpan pinjam perempuan) dan program infrastruktur (fisik). Pada tahun 2014 anggaran untuk desa surakarta disetujui sebesar Rp. 48.319.000,- untuk program SPP yang terbagi dalam dua tahap pencairan yaitu tahap pertama Rp. 949.000,- tahap kedua Rp. 47.370.000,- sedangkan dalam program infrastruktur (fisik) tahap pertama sebesar Rp. 674.000,- tahap kedua Rp. 39.684.000,- tahap tiga Rp.14.775.000,-. Berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Suranenggala pelaksanaan PNPM-MPd di Desa Surakarta meliputi jenis kegiatan Simpan pinjam perempuan (SPP) dengan nama Kelompok Ciremai, Kelompok Galunggung, Kelompok Krakatau, adapun pembiayaan dari PNPM sebesar 15.000.000,- untuk tiap kelompok atas usulan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan) dan pemanfaat masing-masing kelompok berjumlah 20 orang dengan RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk kelompok ciremai 5 orang, Galunggung 7 orang, Krakatau 6 orang. Penggunaan dana SPP oleh masing-masing kelompok untuk menambah modal usaha kecil sebagai pedagang kecil-kecilan. Dengan adanya pinjaman dana SPP dari PNPM-MPd Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Surakarta tumbuh dengan semakin inovatif dalam berkreasi seperti usaha dagang

krupuk kulit, krupuk ikan. Yang dulunya ikan hanya dijual mentah saja. Sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Surakarta. Tingkat pengembalian SPP di Desa Surakarta dikategorikan baik/ tinggi karena mencapai 92%. Pelaksanaan PNPM-MPd Desa Surakarta di bidang infrastruktur dalam jenis kegiatan Sarana Prasarana TPT Plat Ducker dengan volume 452 m³, pembiayaan PNPM sebesar 100.000.000.- jumlah unit 1, dengan swadaya masyarakat sebesar Rp. 930.000.- atas usulan Musyawarah Desa 2, adapun pemanfaat laki-laki 91 orang, perempuan 5 orang jumlahnya 96 orang dengan RTM 61 orang. Keberadaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari PNPM-MPd sangat mendukung dan menunjang berkembangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Surakarta.

2) Desa Keraton

Berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Suranenggala setelah melalui tahapan perencanaan PNPM-MPd mulai dari tingkat RT, dusun, desa dan kecamatan ditetapkan bahwa pelaksanaan PNPM-MPd Desa Keraton mendapatkan jenis kegiatan SPP (Simpan pinjam perempuan) dan jenis kegiatan Sarana Prasarana.

- a) Jenis Kegiatan SPP dengan total SPP sebesar Rp. 26.319.000.- yang dialokasikan untuk 2 kelompok yaitu Kelompok Anggrek sebesar Rp. 13.000.000.- dengan pemanfaat perempuan 13 orang, RTM (Rumah Tangga Miskin) 5 orang dan Kelompok Melati sebesar Rp. 12.000.000.- dengan pemanfaat 15 orang, RTM (Rumah Tngga Miskin) 7 orang, untuk BOP UPK 2% Rp. 530.000.- BOP TPK 3% Rp. 789.000.- terrealisasinya SPP berdasarkan usulan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan). Penggunaan SPP oleh anggota kelompok untuk menambah modal dagang dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Keraton untuk berinovasi membuat krupuk yang terbuat dari kerang ijoan. Tingkat pengembalian SPP di Desa Keraton dikategorikan sedang karena mencapai 70%.
- b) Jenis Kegiatan Sarana Prasarana dengan total sarana Rp. 90.525.000.- yang dialokasikan untuk pembuatan TPT/SPAL sepanjang 255m dengan jumlah unit 1 sebesar Rp. 86.000.000.-, BOP UPK 2% sebesar 1.810.000.- BOP TPK 3% sebesar Rp.2.715.000.- jenis kegiatan tersebut sangat menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Keraton.

3) Desa Suranenggala

Berdasarkan Surat Penetapan Camat Desa Suranenggala dalam pelaksanaan PNPM-MPd mendapatkan jenis kegiatan SPP dan Sarana prasarana sebagai berikut.

- a) Jenis kegiatan SPP dialokasikan untuk satu kelompok pengusul yang diberi nama kelompok sejahtera sebesar Rp. 7000.000, BOP UPK 2% sebesar 148.000, BOP TPK 3% sebesar 221.000.- sehingga total SPP Rp. 7.369.000.- pemanfaat SPP sebanyak 7 orang dan RTM 7 orang. Tingkat pengembalian SPP di Desa Suranenggala dikategorikan rendah karena hanya mencapai 30% hal ini terjadi karena kesaaran masyarakat akan perlunya dana bergulir masih rendah, sehingga SPP banyak yang macet.

- b) Jenis kegiatan sarana prasarana berdasar usulan Musyawarah Desa 2 dengan nama kegiatan rabat beton/ TPT sepanjang 289 m, 55 m (2 unit) dengan pembiayaan sebesar Rp. 85.000.000.-. BOP UPK 2% sebesar Rp.1.789. 000.- BOP TPK 3% sebesar Rp. 2.684.000.- pemanfaat laki-laki 58 orang perempuan 64 orang dan RTM sebanyak 112 orang.
- b. Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Kecamatan Kapatikan bernama Yatra Amanah dipimpin oleh Waryadi, UPK ini mengkoordinir 9 desa yaitu Desa Grogol, Desa Pegagan Kidul, Desa Karangkendal, Desa Pegagan Lor, Desa Kapatikan, Desa Dukuh, Desa Bungko, Desa Kertasura, dan Desa Bungko Lor. Dari 9 desa tersebut penulis mengambil sampel 3 desa dengan kriteria pelaksanaan dalam PNPM-MPd-nya tinggi, sedang dan rendah. Adapun kategori tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
- 1) Tingkat Pengembalian SPP (Simpan Pinjam Perempuan),
 - 2) Tingkat Perencanaan dalam Musyawarah Desa,
 - 3) Tingkat keberhasilan pelaksanaan tahun sebelumnya,
 - 4) Cepat atau lambatnya laporan kegiatan,
 - 5) Tingkat Swadaya Masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat yang muncul,
 - 6) Rencana dan realisasi dalam arti volume tercapai, dan
 - 7) Dukungan Pemerintah Desa.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis mengambil 3 sampel desa sebagai bahan penelitian, yaitu: Desa Pegagan Lor dengan kriteria tinggi, Desa Pegagan Kidul dengan kriteria sedang, dan Desa Bungko Lor dengan kriteria rendah.

- 1) Desa Pegagan Lor

Pelaku PNPM-MPd.

Nama	Jabatan	L/P	Status
Dra. Hj.li fariyani	Kepala desa	L	1
Adnan	Ketua TPK	L	2
Abdus Soim	Sekretaris TPK	L	2
Tarya	Bendahara TPK	L	2
Carwisa	KPMD Teknis	L	3
Vivi Sulastri	KPMD Pembdyn	P	3
Mulya Sidik	TPU	L	3
Tarkadi	TPU	L	3
Iis	TPU	P	3

Keterangan Status: 1. Aparat Desa

2. Pengurus LPM/BPD/TPK

3. Warga masyarakat

Berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Kapetakan Pelaksanaan PNPM-Pd Di Desa Pegagan Lor meliputi 2 jenis kegiatan yaitu ekonomi/ SPP dan Sarana Prasarana. Pelaksanaan SPP sebesar Rp. 94.723.000.- kegiatan dilaksanakan oleh 11 kelompok yaitu Kelompok Teratai, Kelompok Srikandi, Kelompok Sakura, Kelompok Karang Moncol, Kelompok Cempaka, Kelompok Anggrek, Kelompok Jingga masing-masing Rp. 10.000.000, atas usulan perempuan dengan pemanfaat perempuan masing-masing kelompok 10 Orang dengan RTM 9 orang, sedangkan Kelompok Kebon Waru Wetan, Kelompok Silayar jaya, Kelompok Jeruk, Kelompok Dewi Sri masing-masing sebesar Rp. 5.000.000, atas usulan perempuan dengan pemanfaat masing-masing kelompok sebanyak 10 orang dengan RTM masing-masing kelompok sebanyak 9 orang, BOP UPK sebesar 2% Rp. 1.890.000, BOP TPK sebesar 3% Rp. 2.833.000. Tingkat pengembalian Dana SPP di desa Pegagan Lor sebesar 80 % sehingga dikategorikan tinggi hal ini karena masyarakat desa pegagan lor memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat dana PNPM-MPd yang juga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya perempuan dengan tambahan modal usaha dengan menjadi pedagang kecil sehingga dapat membantu penghasilan suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. dari PNPM-MPd. Sedangkan untuk jenis kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp. 262.202.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut.

- a) Pengerasan jalan sepanjang 1x1006 m dengan lebar 2,50 m jumlahnya 1 unit pembiayaan dari PNPM-MPd sebesar Rp. 178.688.000. swadaya masyarakat (swadaya & pemerintah desa) sebesar Rp. 406.000.
- b) Tembok Penahan Tanah (TPT)/ Irigasi sepanjang 1x153 m, lebar 0,30 m atas usulan campuran 9 (perempuan dan laki-laki), pembiayaan dari PNPM-MPd sebesar Rp. 70,404.000, swadaya sebesar Rp. 2.430.000, dengan pemanfaat sebanyak 4428 orang laki-laki, 4812 orang perempuan dan RTM sebanyak 7149. Sehingga dana total untuk tahun 2013 PNPM-MPd di Desa Pegagan Lor sebanyak Rp. 356.925.000.

2) Desa Pegagan Kidul

Pelaku PNPM MPd.

Nama	Jabatan	L/P	Status
Rusdi S	Kepala desa	L	Ap Des
Darip	Ketua TPK	L	TPK
Maudi	Sekretaris TPK	L	TPK
Karina	Bendahara TPK	L	TPK
Misnen Efendi	KPMD Teknis	L	BPD
Iro Ukiro	KPMD Pembdyn	P	Masyarakat
Cetiyani	TPU	P	Masyarakat

Juhando	TPU	L	BPD
Khasan	TPU	L	LPM

Keterangan Status: 1. Aparat Desa

2. Pengurus LPM/BPD/TPK

3. Warga masyarakat

Berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Kapetakan No. 500/94-kec kpt/2013 Desa pegagan Kidul dikategorikan desa dengan pelaksanaan PNPM-MPd sedang hal ini karena pada pelaksanaan PMPN-MPd di desa Pegagan Kidul disetujui untuk melaksanakan 2 jenis kegiatan yaitu ekonomi dan sarana prasarana, dengan jumlah total dana bantuan dana PNPM-MPd sebesar Rp. 350.570.000, dengan alokasi jenis kegiatan sebagai berikut.

- a) Kegiatan ekonomi yaitu peningkatan kapasitas usaha ekonomi yang meliputi kegiatan budi daya ikan lele, tata boga, tata rias penganten, menjahit. Sebesar Rp. 79.000.000, untuk 5 kelompok yang diusulkan oleh perempuan, dengan pemanfaat perempuan berjumlah 79 orang dan RTM sebanyak 72 orang. Kegiatan ini sangat inovatif dan membangun semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pegagan Kidul sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BOP UPK 2% sebesar Rp. 1.660.000 BOP TPK 3% sebesar Rp. 2.493.000, jadi total untuk bidang ekonomi sebesar Rp. 83.153.000.
- b) Kegiatan pembiayaan sarana dan prasarana pembiayaan sebesar Rp. 267.414.000, dilaksanakan untuk kegiatan perkerasan jalan sepanjang 1x700m lebar 2,5 pembiayaan Rp. 127.247.000, swadaya (masyarakat & PAD) Rp. 594.000, untuk kegiatan senderan/TPT/SPAL sepanjang 1x600m lebar 0,25m pembiayaan Rp. 126.800.000 swadaya sebesar Rp. 3.062.000, diusulkan campuran dengan pemanfaat laki-laki 3401 orang, perempuan 1361 orang dan RTM 1361.

3) Desa Bungko Lor

Penerima manfaat dnduduk yang terdiri dari RTM sejumlah 511 dan non RTM sejumlah 360 dan jumlah orang 871.

Berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Kapetakan No. 500/94-kec.kpt/2013. Desa Bungko Lor memperoleh bantuan PNPM-MPd sebesar Rp. 302.131.000 dengan jenins kegiatan sebagai berikut.

- a) Kegiatan Ekonomi yaitu untuk peningkatan kapasitas usaha ekonomi untuk I kelompok dengan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000, diusulkan oleh perempuan dengan pemanfaat sebanyak 40 orang dan RTM 32 orang BOP UPK 2% sebesar Rp. 840.000.000, BOP TPK 3% sebesar Rp. 1.260.000, kegiatan peningkatan kapasitas usaha ini sangat membantu masyarakat Desa Bungko Lor untuk meningkatkan pemberdayaan ekonominya.
- b) Kegiatan saran prasarana dalam bentuk pembuatan senderan/TPT/SPAL sepanjang 2x1384m, lebar 0,25m pembiayaan sebesar Rp. 247.031.000, swadaya masyarakat sebesar Rp. 6.926.000

diusulkan oleh usulan campuran dengan pemanfaat laki-laki sebanyak 481 Orang, perempuan 569 orang, dan RTM sebanyak 500 Orang.

Dengan adanya 2 jenis kegiatan yang diperoleh dari dana bantuan PNPM-MPd tersebut sangat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena akses jalan menuju ke kota ataupun ke tempat lain untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah ditempuh dan menjadi lebih cepat. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling sehingga ditemukan enam desa dari dua kecamatan yang kesemuanya itu adalah masyarakat desa yang memperoleh bantuan dari program PNPM-MPd. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dana dari PNPM-MPd mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya. Bentuk dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan, kesehatan keluarga yang lebih baik, dan adanya investasi/tabungan dalam keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dampak dari penerapan program PNPM-MPd di desa-desa yang penulis teliti yaitu desa Surakarta, desa keraton, desa suraneggala, desa pegagan lor, desa pegagan kidul, desa bungko lor yaitu dengan pemberian bantuan dana ekonomi produktif (simpan pinjam perempuan), pelatihan manajemen usaha, dan pembangunan infrastruktur (sarana prasarana sekolah, senderan, dan pavingisasi jalan).

SIMPULAN

Manfaat Pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Cirebon yaitu Pemberdayaan ekonomi masyarakat meningkat dari yang konservatif menjadi inovatif, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin, Terbukanya kesempatan kerja, Sumber daya manusia meningkat dari yang tidak mengerti manajemen keuangan menjadi mengerti dan di terapkan pada pekerjaan selanjutnya, dan Permodalan untuk modal usaha lebih mudah prosedurnya. Adapun kendala Pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Cirebon yaitu Paradigma perempuan (istri) harus menuruti/ manut sama laki-laki (suami), Usaha yang modalnya diperoleh dari pinjaman dana PNPM bangkrut, Tekanan dari suami sehingga modal usaha yang diperoleh dari pinjaman PNPM habis, Nakal dalam arti salah sasaran, salah prosedur, Uang pinjaman dari PNPM dipakai ketua kelompok, Pengaruh politik di desa (akibat pemilihan kuwu/ pilwu), dan Wacana dana hibah (uang tak bertuan).

DAFTAR PUSTAKA

- (1994), *Kemiskinan dan Peluang Kerja Pedesaan*, Kumpulan Kliping Tahun 1994, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta.
- _____ (1995), *Buku Pedoman Penentuan Desa Tertinggal Tahun 1994*, BPS, Jakarta.
- _____ (2007), *Panduan Program PNPM-MPd*, BAPPENAS, Jakarta.
- _____ (2014), *Laporan Pelaksanaan Program PNPM-MPd Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013/2014*.
- _____ (2014), *Laporan Pelaksanaan Program PNPM-MPd Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013/2014*.
- _____ (2014), *Laporan Pelaksanaan Program PNPM-MPd Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013/2014*, Depdagri RI, Jakarta.

- _____, *Pelaksanaan Program PNPM-MPd sebagai salah satu Alternatif Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kabupaten Cirebon*, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
- _____. (2004), *Metodologi Reserch Jilid 2*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Arifin, Sastramiharja Zaenal, (1995), *Pendekatan Pembangunan Pedesaan*, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Biro Pusat Statistik, (2013), Kabupaten Cirebon Dalam Angka.
blogspot.com/2012/12/kebijakan-terhadap-ukm.html diakses pada tanggal 14 september 2015
- Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI
- Cresswell, John. W. (210), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahuri, Rohmin, (2012), *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan*
- Dahuri, Rohmin, (2012), *Mengelola Pembangunan Berkelanjutan*, Roda Bahari, Bogor.
- Dahuri, Rohmin, (2013), *The Blue Future of Indonesia*, Roda Bahari, Bogor.
- Hadi, Sutrisno (2004), *Metodologi Research jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hardi, Usman (1995), *Konsep Kemiskinan di Indonesia: Tipe dan Faktor Penyebabnya*, BPPN, Makalah Pelatihan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pelatihan Pemecahan Masalah) untuk Jawa Barat.
- Kartono, Kartini (1996), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Penjelasan Petunjuk Tekhnis Operasioal PNPM-MPd*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Nasution, S. dan Thomas, M., (1994), *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, diakses melalui [Http://](http://)
- Peter, Hagul (1985), *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1990), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , Jakarta.
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta.
- Sumardjono, Maria., S. W. (1989), *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Badri sebagai Fasilitator Tingkat Kecamatan pada tanggal 24 Agustus 2015 pukul 9.30
- Wawancara dengan Bapak kaasina sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon, pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 14.00
- Wawancara dengan Bapak kusno sebagai Fasilitator Tingkat Kabupaten pada tanggal 13 Agustus 2015
- Wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai Ketua UPK Kecamatan Suranenggala Pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 9.30
- Wawancara dengan Bapak Waryadi sebagai Ketua UPK Kecamatan Kapetakan pada tanggal 15 Agustus pukul 9.30
- www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html *diakses pada tanggal 10 Agustus 2015*